KATALOG: 9302020.3506

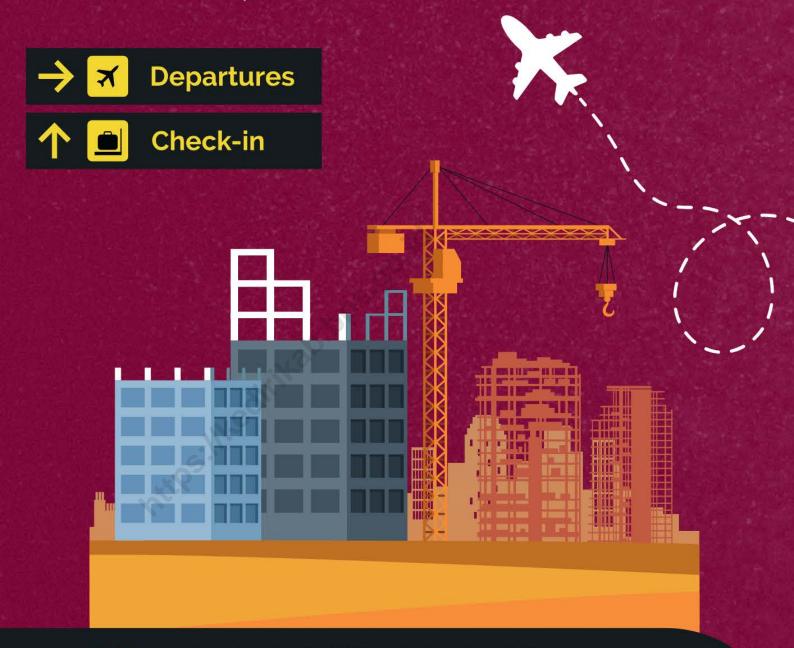
ISSN: 2807-9892

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN KEDIRI

MENURUT PENGELUARAN

2019-2023

Volume VIII, 2024





KATALOG: 932020.3506

ISSN: 2807-9892

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) KABUPATEN KEDIRI MENURUT PENGELUARAN

019-2 httips://kedirikab.hps.go.id

Volume VIII, 2024



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEDIRI MENURUT PENGELUARAN 2019 – 2023

Volume VIII, 2024

ISSN : 2807-9892

Katalog BPS : 9302020.3506

Nomor Publikasi : 35060.2405

Ukuran Buku : 29,7 x 21 cm

Jumlah Halaman : x + 63

Naskah : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri

Ilustrasi kover : -

Diterbitkan Oleh : -

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri.

TIM PENYUSUN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KEDIRI MENURUT PENGELUARAN 2019 – 2023

Penanggungjawab

Hasan As'ari, S.Si, M.E

Penyunting

BPS Kabupaten Kediri

Penulis

Rietmianggara Yudha Candra, SST.

Pengolah Data

Ismana Hudi

Desain Gambar Kulit

Bitasari Pascalisa, SST

Hitosilikabinikab basila kabinikab basila kabinikab basilikab basilikab basilikab basilikab basilikab basilikab

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kediri menurut Pengeluaran Tahun

2019-2023 merupakan salah satu publikasi yang diterbitkan BPS Kabupaten Kediri. PDRB

merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja

pembangunan ekonomi suatu wilayah.

Publikasi ini secara khusus membahas PDRB menurut pengeluaran/permintaan akhir, yang

dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran

Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah,

Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), serta Ekspor Neto antar

daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini

menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008

seperti yang direkomendasikan oleh United Nations.

Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku

ini, terutama kepada kontributor data baik dari instansi pemerintah maupun swasta. Kritik dan saran

membangun kami sangat harapkan untuk meningkatkan penyajian data PDRB di masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan data dari semua pihak

Kediri, April 2024

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Kediri,

Hasan As'ari

Hitosille dirikab basila kabin kabin

DAFTAR ISI

KATA	PENGANTAR	١
DAFT	AR ISI	vi
DAFT	AR TABEL	vii
DAFT	AR GRAFIK	ίλ
DAFT	AR LAMPIRAN	>
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3
1.2	Perubahan Tahun Dasar PDRB	7
1.3	Kegunaan Statistik PDRB	10
BAB I	II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	13
2.1	Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT)	15
2.2	Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT)	17
2.3	Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P)	18
2.4	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
2.5	Perubahan Inventori (PI)	22
2.6	Ekspor - Impor	24
BAB I	III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN KEDIRI MENURUT PDRB PENGELUARAN 2016 - 2020	27
3.1	Perkembangan PDRB Pengeluaran	29
3.2	Perkembangan Komponen PDRB Pengeluaran	37
3.2.1	. Konsumsi Akhir Rumahtangga	37
3.2.2	. Konsumsi Akhir LNPRT	39
3.2.3	. Konsumsi Akhir Pemerintah	39
3.2.4	. Pembentukan Modal Tetap Bruto	41
3.2.5	. Perubahan Inventori	42
3.2.6	. Net Ekspor Barang dan Jasa	44
BAB I	V PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN KEDIRI	47
4.1	PDRB (Nominal)	49
4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB	50
4.3	Average Propensity To Consume (APC) Dan Average Propensity To Save (APS)	51
4.4	Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	53
LAMF	PIRAN	55
DAFT	AR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 - 2023 30			
Tabel	3.2	3.2 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019			
		- 2023	31		
Tabel	3.3	Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,			
		Kabupaten Kediri 2019 – 2023	33		
Tabel	3.4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 201p0 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019			
		- 2023	35		
Tabel	3.5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	36		
Tabel	3.6	Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 - 2023 36			
Tabel	3.7	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	38		
Tabel	3.8	Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	39		
Tabel	3.9	Laju Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga,			
		Kabupaten Kediri 2019 – 2023	40		
Tabel	3.10	Perkembangan dan Struktur PMTB, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	42		
Tabel	3.11	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	43		
Tabel	3.12	Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	45		
Tabel	4.1	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	50		
Tabel	4.2	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB, Kabupaten Kediri			
		2019-2023	51		
Tabel	4.3	Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save, Kabupaten Kediri Tahun			
		2019-2023	52		
Tabel	4.4	Incremental Capital Output Ratio, Kabupaten Kediri 2019-2023	53		

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	30
Grafik 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	32
Grafik 3.3	Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	32
Grafik 3.4	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	34
Grafik 3.5	Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023	35
	ntite silke dirike	

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri Tahun 2019 - 2023 (miliar rupiah)	57
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019 - 2023 (miliar rupiah)	57
Tabel 3	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019–2023 (persen)	58
Tabel 4	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019 – 2023	58
Tabel 5	Indeks Harga Implisit PDRB (2010=100) Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri Tahun 2019 – 2023.	59
Tabel 6	Laju Indeks Harga Implisit PDRB (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019 – 2023 (persen)	59



Hitles: IIRedirikab bees of ide

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unitunit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

- 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
- 2. Pertambangan dan Penggalian,
- 3. Industri Pengolahan,
- 4. Pengadaan Listrik dan Gas,
- 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang,
- 6. Konstruksi,
- 7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
- 8. Transportasi dan Pergudangan,
- 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum,
- 10. Informasi dan Komunikasi,
- 11. Jasa Keuangan dan Asuransi,
- 12. Real Estat,
- 13. Jasa Perusahaan,
- 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
- 15. Jasa Pendidikan,

- 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
- 17. Jasa lainnya.

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

- 1. pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
- 2. pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga
- 3. pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
- 4. pembentukan modal tetap domestik bruto
- 5. perubahan inventori
- 6. net ekspor (ekspor dikurangi impor)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)¹. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side*) dan sisi permintaan (*demand side*) barang dan jasa.

Secara konsep² penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk:

- i. memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi;
- ii. memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan
- iii. mengontrol kelayakan hasil estimasi.

Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa *(output)* yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimasukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran

¹ Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)

² Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)

antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Penyusunan data PDRB Pengeluaran juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat³, yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai "output akhir (final output)". Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb:

$Y = C + GFCF + \Delta Inventori + X - M$

Y (*Income*) = PDRB Produksi

C (Consumption) = Konsumsi akhir

GFCF (*Gross Fixed Capital Formation*) = Pembentukan Modal Tetap Bruto

 Δ Inventori = Perubahan Inventori

X = Ekspor M = Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

⁻ Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut



BAB I Pendahuluan

^{3. -} Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah

⁻ Disebut sebagai pendekatan "riil"

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat tentang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (*SNA*) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

- a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kualitas PDRB;
- c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

- a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
- b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- c. Perubahan input data untuk keperluan modeling dan forecasting.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun⁴;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

Konsep dan Cakupan

-

 $^{^4}$ SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"

- a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources*/ *CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.
- b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.
- c. Penelitian dan pengembangan (*research and developmentl RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.
- d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.
- e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.
- f. Komputer software (*computer software and databases*/ *CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.
- h. Pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (*IBSC*).

Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

	PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah tangg	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah
		tangga
2.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintal	Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
	Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5.	Ekspor	5. Perubahan Inventori
6.	Impor	6. Ekspor
0.	Шрог	7. Impor

1.3 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

- PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
- 2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- 3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu negara.
- 4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.

- 5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- 6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
- 7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
- 8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

hitips://kedirikab.bps.doid

Hitles: IIRedirikab bees of ide



Hitles: IIRedirikab bees of ide

1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran⁵. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sebagai berikut:

- 1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
- 2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
- 3. Pakaian dan alas kaki
- 4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
- 5. Furniture, perlengkapan rumah tangga dan pemeliharaan rutin
- Kesehatan
- 7. Angkutan
- 8. Komunikasi
- 9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
- 10. Pendidikan
- 11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
- 12. Barang dan jasa lainnya

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 7 COICOP, yaitu:

- 1. Makanan, Minuman, dan Rokok
- 2. Pakaian dan Alas Kaki
- 3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
- 4. Kesehatan dan Pendidikan
- 5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
- 6. Hotel dan Restoran
- 7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumah tangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

- 1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
- 2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
- 3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
- 4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
- 5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
- 6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
- 7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumah tangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAH TANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumah tangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

iv. Sumber Data

- a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah tangga (SK-LNP), BPS
- b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
- c. Hasil up-dating direktori LNPRT, BPS

d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda, sebagai berikut:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;

2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori

LNPRT;

3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-

LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan

penanganan bencana;

4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);

5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);

6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan

poin 5.

Catatan:

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran

konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai

kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-

batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi

individu atau kelompok rumah tangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya,

serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit

pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang

dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai

konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah

melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi

oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai

pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.

2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam praktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing. PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan Bappeda
- Statistik Keuangan Daerah, BPS
- c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
- d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Bappeda
- e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
- f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output - Penjualan barang dan jasa +

Social transfer in kind purchased market production + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan:

- 1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
- 2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakaan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	00
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan

aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

- Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);
- Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
- 3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

- a. Output industri konstruksi, BPS
- b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
- d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
- f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
- Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
- j. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung

tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

✓ Metoda Tidak Langsung:

Pendekatan Supply : PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

Pendekatan Ekstrapolasi:

PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau persediaan; serta
- h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah:

 Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);

- 2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
- 3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
- 4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
- 5. Data komoditas perkebunan;
- 6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
- 7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
- 8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume Inventori (t) – Volume Inventori (t-1)) x Harga per unit PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
- b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metoda tidak langsung.



3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Selama kurun waktu 2019-2023, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Kediri berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dapat dilihat pada tabel 3.1. Nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam penghitungan PDRB ADHB. Dalam PDRB ADHK pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Kediri selama kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PDRB ADHB Kabupaten Kediri mencapai 41,18 triliun rupiah. Dalam rentang lima tahun, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga mencapai 50,64 triliun rupiah pada tahun 2023. Atau mengalami peningkatan sebesar 22,96 persen. Peningkatan tersebut terjadi pada komponen pembentuknya mulai dari komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, dan PMTB.

Bila dijabarkan pada periode tahun 2019-2023 PDRB Kabupaten Kediri atas dasar harga berlaku yakni sebesar 41.183,68 milliar rupiah pada tahun 2019; 40.626,77miliar rupiah (2020), 42.692,71 miliar rupiah (2021), 46.650,03 miliar rupiah di tahun 2022 dan sebesar 50.638,15 miliar rupiah di tahun 2023. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran.

Jika diperhatikan, pada tahun 2020 PDRB ADHB Kabupaten Kediri mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, yakni dari 41,2 triliun rupiah menjadi 40,6 triliun rupiah atau menurun sebesar 1,35 persen. Penurunan di tahun 2019-2020 merupakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tidak terkecuali Indonesia. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen. Perekonomian Jawa Timur pun pada saat itu terkontraksi 2,39 persen . Begitupun perekonomian nasional yang terkontraksi sebesar 2,07 persen.

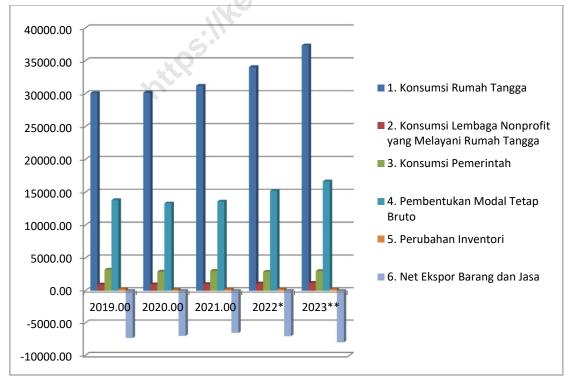
Pada tahun 2023 PDRB ADHB Kabupaten Kediri kembali mengalami peningkatan yakni dari 46,65 triliun rupiah menjadi 50,64 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 8,5 persen. Hal ini ditunjang oleh berbagai faktor diantaranya kasus Covid-19 yang sudah mulai mereda dan pemulihan ekonomi oleh pemerintah yang cukup baik sehingga mendorong dunia usaha untuk kembali bergeliat. Rasa aman dan stabilnya perekonomian juga mendorong permintaan terhadap barang atau jasa yang meningkat, akibatnya konsumsi masyarakat juga meningkat.

Tabel 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri, 2019-2023

					(Miliar Rp)
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	30.111,11	30.176,96	31.235,44	34.069,69	37.371,28
2. Konsumsi LNPRT	986,34	1.007,84	1.043,55	1.133,47	1.232,86
3. Konsumsi Pemerintah	3.259,82	2.960,67	3.079,64	2.938,35	3.049,89
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.832,24	13.332,79	13.608,34	15.255,75	16.680,11
5. Perubahan Inventori	302,64	120,49	232,75	261,21	269,19
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-7.308,45	-6.971,97	-6.507,02	-7.008,43	-7.965,17
PDRB	41.183,68	40.626,77	42.692,71	46.650,03	50.638,15

Keterangan: *) Angka sementara

Grafik 3.1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019– 2023



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

^{**)} Angka sangat sementara

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang devaluasi dengan harga tahun dasar (2010). Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Kediri pada periode 2019 – 2023 dapat dilihat dari tabel 3.2 dan grafik 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri, 2019-2023

					<i>(</i> Miliar Rp <i>)</i>
Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	20.524,06	20.312,78	20.907,21	21.786,40	22.672,72
2. Konsumsi LNPRT	622,32	625,14	639,21	679,71	730,09
3. Konsumsi Pemerintah	1.882,24	1.807,23	1.810,45	1.812,88	1.829,40
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.091,84	8.637,93	8.773,56	9.397,96	9.980,94
5. Perubahan Inventori	197,91	78,26	148,64	161,03	158,51
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-3.124,65	-2.970,39	-2.917,39	-3.037,28	-3.176,16
PDRB	29.193,72	28.490,95	29.361,67	30.800,71	32.195,50

Keterangan: *) Angka sementara

Dari tabel 3.2, terlihat bahwa selama lima tahun terakhir nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Kediri cenderung mengalami peningkatan, yakni 29.193,72 miliar Rupiah (2019), 28.490,95 miliar Rupiah (2020), 29.361,67 miliar rupiah (2021), 30.800,71 miliar di tahun 2022 dan 32.195,50 miliar rupiah di tahun 2023. Sedangkan dari grafik 3.2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kediri cukup berfluktuasi, yakni dari 5,06 persen di tahun 2019, terkontraksi menjadi -2,41 persen di tahun 2020 yang merupakan dampak dari pendemi Covid-19 dan pada masa pemulihan ekonomi meningkat sebesar 3,06 persen di tahun 2021, dan pada tahun 2022 Kabupaten Kediri tumbuh sebesar 4,90 persen dan di tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 4,53 persen.

^{**)} Angka sangat sementara

35000.00
30000.00
25000.00
25000.00
15000.00
15000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00
10000.00

PDRB

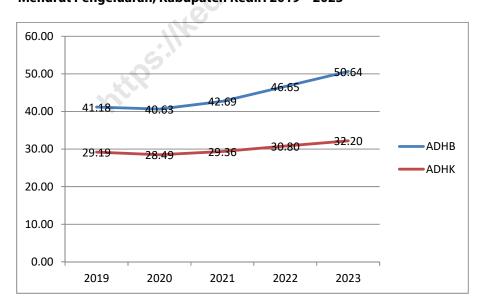
Grafik 3.2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023

Sumber: BPS Kabupaten Kediri

0.00

-5000.00

2019



Grafik 3.3. Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023

2022*

2023*

2021

Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Dari grafik 3.3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3.3 Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri, 2019-2023

(persen) Komponen Pengeluaran 2019 2020 2021 2022* 2023** (2) (3) (4) (5) (6) 1. Konsumsi Rumah Tangga 73,11 74,28 73,16 73,03 73,80 2. Konsumsi LNPRT 2,39 2,48 2,44 2,43 2,43 3. Konsumsi Pemerintah 7,92 7,29 7,21 6,30 6,02 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto 33,59 32,82 31,88 32,70 32,94 5. Perubahan Inventori 0,73 0,30 0,55 0,56 0,53 6. Net Ekspor Barang dan Jasa -17,75 -17,16 -15,24 -15,02 -15,73**PDRB** 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

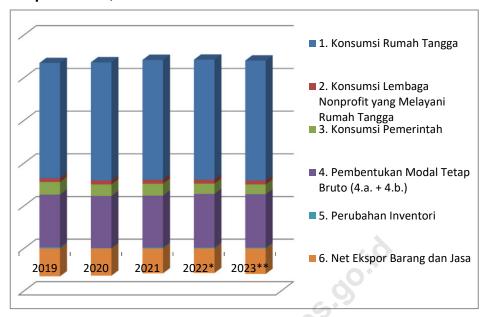
Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Net Ekspor Barang dan Jasa (E) atau ekspor dikurangi impor barang dan jasa. Tiap daerah memiliki komposisi kontribusi masing-masing komponen yang berbeda-beda dalam membentuk nilai PDRB total. Pada umumnya, komponen pengeluaran dari konsumsi akhir rumah tangga merupakan komponen yang paling banyak menyumbang kontribusi dalam membentuk nilai PDRB (tanpa memperhitungkan net ekspor) di wilayah-wilayah Indonesia.

Dari tabel 3.3 terlihat bahwa selama periode 2019-2023, PDRB Kabupaten Kediri sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT). Pengeluaran untuk konsumsi akhir rumah tangga mencapai 72 s.d 74 persen. Sementara itu, pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mempunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 31 s.d 33 persen. Sedangkan kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 6 s.d 7 persen. Komponen pengeluaran lainnya yaitu konsumsi LNPRT dan Perubahan Inventori yang masing-masing berkontribusi pada rentang 0 s.d 2 persen. Sedangkan komponen pengeluaran net ekspor sebagai komponen pengurang PDRB berkontribusi sebesar minus 14 s.d 17 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian kebutuhan domestik masih harus dipenuhi oleh produk yang berasal dari luar wilayah atau bahkan luar negeri (impor).

Grafik 3.4. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri, 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Komponen net ekspor merupakan gambaran aktivitas perdagangan luar wilayah. Di Kabupaten Kediri, komponen ini menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi "defisit" atau merugikan. Hal ini karena Kabupaten Kediri adalah bukan daerah sentra industri dan perdagangan, sehingga sebagian besar kebutuhan sehari-hari produk industri dan perdagangan didatangkan dari luar wilayah. Produk pertanian banyak mendominasi ekspor Kabupaten Kediri, seperti tanaman bahan makanan (khususnya cabai dan nanas), Perkebunan (tebu dan kopi), Perikanan (air tawar dan hias), dan Peternakan (sapi potong dan ayam ras). Sedangkan produk industri yang merupakan pangsa ekspor adalah produk kertas rokok.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 3. 4, selama periode tahun 2019-2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kediri mengalami fluktuasi, yakni sebesar 5,06 persen (2019), -2,41 persen (2020), 3,06 persen (2021), 4,90 persen (2022) dan 4,53 persen pada tahun 2023. Fluktuasi kondisi ekonomi dipengaruhi oleh berbagai fenomena. Sebagaimana pada tahun 2020, semua komponen pengeluaran merosot tajam yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 laju pertumbuhan masing-masing komponen pengeluaran sudah mengalami peningkatan. Dan pada tahun 2022 dan 2023 seiring dengan pemulihan ekonomi yang membaik, laju pertumbuhan semakin membaik. Komponen pengeluaran yang paling *significant* peningkatannya adalah komponen pengeluaran LNPRT yaitu dari 6,34 persen pada tahun 2022 menjadi 7,41 persen pada tahun 2023 atau meningkat sebesar 1,07 persen poin. Selain itu, pada komponen pengeluaran Konsumsi Pemerintah juga meningkat sebesar 0,78 persen poin dibandingkan tahun 2022.

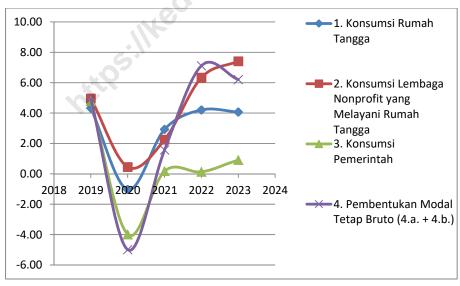
Tabel 3.4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019-2023

(persen) Komponen Pengeluaran 2022* 2023** 2019 2020 2021 (2) (3) (4) (5) (6) 1. Konsumsi Rumah Tangga 4,33 -1,03 2,93 4,21 4,07 2. Konsumsi LNPRT 4,97 0,45 2,25 6,34 7,41 3. Konsumsi Pemerintah 4,79 -3,99 0,18 0,13 0,91 4. Pembentukan Modal Tetap 4,94 -4,99 1,57 7,12 6,20 Bruto (PMTB) 5. Perubahan Inventori 6. Net Ekspor **PDRB** 5,06 -2,413,06 4,90 4,53

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Grafik 3.5. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Komponen Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Kediri

Indeks implisit⁶ PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 3.5 akan terlihat tingkat

⁶ Indeks perkembangan

kenaikan harga selama periode tahun 2019-2023, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 3.5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021*	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	146,71	148,56	149,40	156,38	164,83
2. Konsumsi LNPRT	158,49	161,22	163,26	166,76	168,86
3. Konsumsi Pemerintah	173,19	163,82	170,10	162,08	166,72
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	152,14	154,35	155,11	162,33	167,12
5. Perubahan Inventori	-	-	- ^	-	-
6. Net Ekspor	-	-	9	-	-
PDRB	141,07	142,60	145,40	151,46	157,28

Keterangan: *) Angka sementara

Tabel 3.6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Kediri 2019-2023

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022**	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	3,07	-0,72	2,09	2,76	0.77
2. Konsumsi LNPRT	0,11	0,01	0,05	0,10	0.00
3. Konsumsi Pemerintah	0,31	-0,26	0,01	0,00	-0.28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,54	-1,55	0,48	2,13	0.24
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor	-	-	-	-	-
PDRB	5,06	-2,41	3,06	4,90	4,53

Keterangan: *) Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

^{**)} Angka sangat sementara

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukkan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumah tangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Kediri untuk periode 2019-2023.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumah tangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Kediri, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Kediri maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumah tangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumah tangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Secara umum, konsumsi rumah tangga Kabupaten Kediri selama tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Tahun 2019 total konsumsi rumah tangga Kabupaten Kediri sebesar 30.111,11 miliar rupiah. Selanjutnya, terjadi peningkatan konsumsi menjadi 30.176,96 miliar rupiah pada tahun 2020; 31.235,44 miliar rupiah (2021); 34.069,69 miliar (2022) dan 37.371,28 miliar rupiah pada tahun 2023. Sementara itu, atas dasar harga konstan (2010) total konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 mencapai 20.524,06 miliar yang meningkat 22.672,72 miliar rupiah pada tahun 2023 atau terjadi kenaikan sebesar 10,47 persen.

Tabel 3.7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kabupaten Kediri 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga a. ADHB (Miliar Rp)	30.111,11	30.176,96	31.235,44	34.069,69	37.371,28
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	20.524,06	20.312,78	20.907,21	21.786,40	22.672,72
Proporsi terhadap PDRB /persen ADHB/	73,11	74,28	73,16	73,03	73,80
Rata-rata konsumsi per-Kapita (Ribu Rp) a. ADHB	19.120,94	18.439,53	18.995,04	20.474.51	22.282.37
b. ADHK 2010	13.033,15	12.453,06	12.714,18	13.092.75	13.518,46
Pertumbuhan a. Total konsumsi RT	4,33	-1,03	2,93	4,21	4,07
b. Perkapita	3,92	-4,54	2,19	3,14	3,25
Jumlah Penduduk	1.568.113	1.574.771	1.632.608	1.664.005	1.677.168

Keterangan:

Selama periode 2019-2023 proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap total PDRB juga berfluktuatif (seperti grafik cosinus), yaitu 73,11persen pada tahun 2019 ; 74,28 persen pada tahun 2020; 73,16 persen pada tahun 2021 dan 73,03 pada tahun 2022 dan 73,80 pada tahun 2023.

Secara rata-rata konsumsi per kapita dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2019, konsumsi rumah tangga per kapita adhb di Kabupaten Kediri menghabiskan dana sekitar 19,12 juta rupiah setahun. Pengeluaran tersebut meningkat menjadi 18,44 juta rupiah (2020); 18,99 juta rupiah (2021); 20,47 juta rupiah (2022) dan mencapai 22,28 juta rupiah di tahun 2023. Kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Dari sisi pertumbuhannya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga lima tahun terakhir berada pada kisaran angka 4 persen. Kecuali, pada tahun 2020 yang anjlok hingga sebesar minus 1,03 persen. Namun, dapat meningkat lagi sebesar 3,14 persen pada tahun 2022. Begitupun pertumbuhan konsumsi perkapita pada tahun 2024 dapat tumbuh sebesar 3,35 persen.

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya. LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup. LNPRT mencakup lembaga politik, keagamaan, pendidikan, penyaluran aspirasi masyarakat sesuai dengan profesinya yang pendiriannya tidak berbasis keuntungan.

Berdasarkan tabel 3.10, total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada tahun 2019 konsumsi LNPRT sebesar 986,34 miliar rupiah, 1.007,84 miliar Rupiah (2020); 1.043,55 miliar rupiah (2021), 1.133,47 (2022) dan 1.232,86 miliar di tahun 2023. Proporsi dalam struktur PDRB pengeluaran berada pada kisaran 2 persen. Hal ini mengindikasikan peranan LNPRT masih relatif kecil. Sedangkan pertumbuhan pengeluaran konsumsi LNPRT per tahunnya berturut-turut sebesar : 4,97 (2019); 0,45 (2020); 2,25 persen (2022); 6,34persen (2022) dan 7,41 ditahun 2023.

Tabel 3.8. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Kediri (miliar rupiah), 2019-2023.

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB	986,34	1007,84	1043,55	1133,47	1232,86
b. ADHK 2010	622,32	625,14	639,21	679,71	730,09
Proporsi terhadap PDRB					
(persen ADHB)	2,39	2,48	2,44	2,43	2,43
Pertumbuhan <i>(ADHK 2010)</i>	4,97	0,45	2,25	6,34	7,41

Keterangan: *) Angka sementara

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat. dimana ciri-ciri barang privat adalah:

a) Scarcity. yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah.

^{**)} Angka sangat sementara

- b) *Excludable Consumption*. yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga).
- c) *Rivalrous Competition*. yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri-ciri:

- a) *Non Rivalry.* yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.
- b) *Non Excludable*. yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut.

Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian

Tabel 3.9. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Kediri 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah (Miliar Rp)	Sill'				
a. ADHB	3.259,82	2.960,67	3.079,64	2.938,35	3.049,89
b. ADHK 2010	1.882,24	1.807,23	1.810,45	1.812,88	1.829,40
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	7,92	7,29	7,21	6,30	6,02
Konsumsi Pemerintah per- kapita <i>(Ribu Rp)</i>					
a.ADHB	2.070,68	1.813,46	1.872,80	1.765,83	1.818,47
b.ADHK 2010	1.195,62	1.106,96	1.100,98	1.089,47	1.090,77
Pertumbuhan					
a. Total konsumsi pemerintah	4,79	(3,99)	0,18	0,02	0,02
b.Konsumsi per kapita	4,34	(7,39)	(0,54)	(0,68)	0,12
Jumlah penduduk	1.568.113	1.574.771	1.632.608	1.664.005	1.677.168

Keterangan: *) Angka sementara

Berdasarkan PDRB adhb, perkembangan pengeluaran pemerintah tahun 2019-2023 cenderung mengalami penurunan. Jika dijabarkan pada tahun 2019 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah atas dasar harga berlaku adalah sebesar 3.259,82 miliar rupiah, kemudian pada tahun berikutnya 2.960,67 miliar rupiah (2020); 3.079,64 miliar rupiah pada tahun 2021; 2.938,35 (2022) dan 3.049,89 miliar pada tahun 2023. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan 2010, pada tahun

^{**)} Angka sangat sementara

2020 pengeluaran konsumsi pemerintah cenderung menurun dan kembali meningkat pada tahun 2021 hingga mencapai 1.810,45 miliar rupiah. Dan pada tahun 2023 berubah mencapai 1.829,40 miliar rupiah

Proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga cenderung mengalami penurunan yakni dari sebesar 7, 92persen (2019); 7, 29persen (2020); 7, 21persen (2021); 6, 30persen (2022) dan 6,02 persen pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan dampak pandemi Covid-19 juga berimbas terhadap peranan pengeluaran pemerintah dalam kontribusinya terhadap PDRB.

Sebagaimana salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Pengeluaran pemerintah selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2023, pengeluaran konsumsi pemerintah yang cenderung menurun mempengaruhi menurunnya juga rata-rata konsumsi pemerintah per kapita. Hal ini dapat dilihat pada konsumsi pemerintah perkapita pada tahun 2023 sebesar 1,87 juta rupiah. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemik Covid-19, konsumsi pemerintah per kapita bisa mencapai 2,07 juta rupiah pada tahun 2019 dan 1,8 juta rupiah pada tahun 2020.

Hal yang sama terjadi pada rata-rata konsumsi pemerintah per kapita atas dasar harga konstan 2010 yang juga menunjukkan trend yang sama. Sedangkan dilihat dari laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi cenderung berfluktuatif yaitu sebesar 4,79 persen (2019); -3,99 persen (2020); 0,18 persen (2021); 0,02 persen di tahun 2022 dan 0,02 persen di tahun 2023.

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁷. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa secara keseluruhan rata-rata pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2019-2023 sebesar 2,97 persen, dimana pada tahun 2020 pertumbuhan PMTB merosot tajam hingga terkontraksi sebesar 4,99 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan PMTB terdongkrak

-

⁷ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

hingga mencapai 1,57 persen atau meningkat sebesar 6,56 persen poin dan ditahun 2023 mencapai 6,20 persen

Dalam kurun waktu 2019-2023, peranan PMTB terhadap PDRB cenderung menurun, Jika dijabarkan yakni dari 33,59 persen pada tahun 2019; 32,82 persen (2020); 31,88 persen (2021); 32,70 persen (2022) dan 32,94 persen (2023). Imbas dari pandemi Covid-19 mengakibatkan proyek pembangunan dan investasi sempat terhenti, sehingga pembentukan PMTB juga menurun. Struktur PMTB terbesar berasal dari PMTB Bangunan dengan proporsi diatas 76 persen. Pada tahun 2020, peranan komponen sempat turun jika dibandingkan tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, yakni dari 76,33 persen menjadi 76,07 persen. Seiring stablinya ekonomi, proses pembangunan infrastruktur kembali berjalan sehingga struktur PMTB bangunan mendekati sebelum tejadinya pandemi yaitu sebesar 76,62 persen pada tahun 2023.

Tabel 3.10. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB <i>(Miliar Rp)</i>	13.832,24	13.332,79	13.608,34	15.255,75	16.680,11
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9.091,84	8.637,93	8.773,56	9.397,96	9.980,94
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	33,59.	32,82.	31,88.	32,70	32,94
Struktur PMTB 8					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	10.558,49	10.141,90	10.353,98	11.634,29	12.778,98
(persen)	25,64	24,96	24,25	24,94	25,24
b.Non Bangunan (<i>Miliar Rp</i>)	3.273,73	3.190,88	3.254,35	3.621,46	3.901,12
(persen)	7.95	7.85	7.62	7.76	7.70
Pertumbuhan ⁹ (persen)					
a. Bangunan	4,82	-5,23	1,91	7,40	7,08
b. Non Bangunan	5,30	-4,30	0,59	6,31	3,63
c. Total PMTB	4,94	-4,99	1,57	7,12	6,20

Keterangan: *) Angka sementara

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk "persediaan" berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi

^{**)} Angka sangat sementara

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)

ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 3.11. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori		70.,			
a. ADHB <i>(Miliar Rp)</i>	302,64	120,49	232,75	261,21	269,19
b. ADHK 2010 <i>(Miliar Rp)</i>	197,91	78,26	148,64	161,03	158,51
Proporsi terhadap PDRB (persen - ADHB)	0,73	0,30	0,55	0,56	0,53

Keterangan:

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada periode tahun 2019-2023 perubahan inventori atas dasar harga berlaku secara umum menurun. Berturut-turut nilai perubahan inventori adalah sebagai berikut 302,64 miliar rupiah (2019); turun menjadi 120,49 miliar rupiah (2020), 232,75 miliar rupiah (2021); 261,21 miliar rupiah pada tahun 2022 dan 269,19 miliar rupiah pada tahun 2023.

Begitupun, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB cenderung menurun yakni pada tahun 2019, proporsi perubahan inventori adalah 0,73 persen, 0,30 persen (2020); pada tahun 2021 menjadi 0,55 persen; naik menjadi 0,56 di tahun 2022 dan pada tahun 2023 mencapai 0,53 persen.

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

3.2.6. Net Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor antar daerah didefinisikan sebagai ekspor antar daerah dikurangi impor antar daerah. Berbeda dengan penghitungan ekspor-impor barang dan jasa luar negeri, pada penghitungan ekspor-impor antar daerah tidak tersedia sumber data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Sumber data yang tersedia selama ini hanya menunjukkan adanya transaksi namun tidak diketahui berapa nilai uang yang terjadi dalam transaksi tersebut. Keberadaan data dengan kondisi seperti ini menyebabkan penghitungan ekspor-impor antar provinsi atau antar kabupaten/kota menjadikan komponen ini (dalam series PDRB adhKonstan 2010) diperlakukan sebagai item penyeimbang (residual), yakni perbedaan antara total PDRB menurut lapangan usaha dengan total PDRB menurut Pengeluaran. Ketersediaan data yang ada lebih sesuai untuk dimanfaatkan sebagai informasi pendukung.

Komponen ini secara implisit mencakup dua unsur pokok yaitu: ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, net ekspor antar daerah juga hasilnya dapat memiliki 2 (dua) angka, positif atau negatif. Jika komponen ini bertanda "positif" berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar dari pada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya. Pada saat ini untuk memisahkan net ekspor antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling.* Metode ini bekerja dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (demand) dan penyediaan (supply) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitung ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance.* Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output "bayangan". Dalam metode ini, transksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan demand dan supply suatu perekonomian.

Selama tahun 2019-2023 nilai nominal net ekspor Kabupaten Kediri selalu bernilai negatif, yang artinya neraca antar daerah di Kabupaten Kediri mengalami deficit yang artinya nilai ekspor Kabupaten Kediri lebih rendah dari impor antar daerahnya. Pada tahun 2019 nilai net ekspor sebesar negatif 7.308,45 miliar rupiah, tahun 2020 nilai net ekspor sebesar negatif 6.971,97 miliar rupiah, kemudian negati 6.507,02 miliar rupiah (2021), negatif 7.008,43 miliar rupiah (2022) dan negatif 7.965,17 miliar rupiah pada tahun 2023.

Tabel 3.12. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Kediri, 2019-2023

	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total	Nilai Net Ekspor Barang dan Jasa					
a.	ADHB <i>(Miliar Rp)</i>	-7.308,45	-6.971,97	-6.507,02	-7.008,43	-7.965,17
b.	ADHK 2010 <i>(Miliar Rp)</i>	-3.124,65	-2.970,39	-2.917,39	-3.037,28	-3.176,16
	orsi terhadap PDRB en - ADHB)	-17,75	-17,16	-15,24	-15,02	-15,73

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus giat menstimulus pengusaha agar menghasilkan produk yang berdaya guna dan bersaing di pasaran sehingga produknya dapat memenuhi kebutuhan dalam wilayah dan juga produk dapat diekspor ke luar daerah dan laku dipasaran. Sehingga nilai eksporpun dapat meningkat.



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PDRB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Kediri, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik. yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja) Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Selama periode 2019-2023, PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kediri cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun sempat mengalami kemerosoton pada saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pada tahun 2019, besaran PDRB adhb sebesar Rp 41,18 triliun menjadi sebesar Rp 50,64 triliun pada tahun 2023. Hal yang sama juga terjadi pada perhitungan PDRB atas dasar harga konstan yang mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019, besaran PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Kediri adalah sebesar Rp 29,19 triliun dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp 32,19 triliun.

Dengan meningkatnya nilai PDRB selama periode 2019-2023, maka PDRB per kapita Kabupaten Kediri juga mengalami peningkatan. PDRB per kapita menggambarkan pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama kurun waktu satu tahun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita sebesar Rp 26,15 juta; Rp 24,88 juta (2020); Rp 25,96 juta (2021); Rp 28,03 juta (2022) dan Rp 30,19 juta di tahun 2023. Penurunan PDRB per kapita pada tahun 2020 merupakan akibat dari pandemi Covid-19.

Sementara itu, selama lima tahun terakhir, pertumbuhan riil PDRB pengeluaran mengalami fluktuasi dengan titik terendah sebesar minus 2,41 pada tahun 2020. Sedangkan pertumbuhan PDRB tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 5,06 persen. Begitupun dengan pertumbuhan PDRB Per kapitanya, pada tahun 2020 merosot hingga minus 5,86 persen. Sebelumnya, pertumbuhan PDRB Per kapita Kabupaten Kediri berada pada kisaran 4 persen. Pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB Per kapita meningkat menjadi 2,32 persen. Dan pada tahun 2023 menjadi 4,53 persen. Pertumbuhan ini diikuti pula dengan penambahan jumlah penduduk dengan laju rata-rata pertumbuhan penduduk kurang dari 1 persen. Dengan demikian, pertumbuhan per kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" yang disebabkan oleh perubahan harga tetapi juga terjadi secara kuantitas.

Tabel 4.1 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB <i>(Miliar Rp)</i>					
- ADHB	41.183,68	40.626,77	42.692,71	46.650,03	50.638,15
- ADHK 2010	29.193,72	28.490,95	29.361,67	30.800,71	32.195,50
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	26.152,17	24.884,58	25.962,49	28.034,79	30.192,65
- ADHK 2010	18.538,39	17.451,19	17.855,55	18.509,98	19.196,35
Pertumbuhan Ekonomi	5,06	-2,41	3,06	4,90	4,53
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,62	-5,86	2,32	4,16	4,04
		O.			
Jumlah penduduk	1.568.113	1.574.771	1.632.608	1.644.005	1.677.168
Pertumbuhan (%)	0,43	0,42	3,67	0,72	-0,32
otorangan, *\ Angka comontara					

Keterangan:

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa rata-rata proporsi konsumsi akhir terhadap PDRB selalu diatas 80 persen. Hal ini mengindikasikan sebagian besar barang dan jasa yang berada diwilayah domestik digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir. Peningkatan nilai konsumsi akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup manusia yang tercermin dari meningkatnya angka IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Peningkatan proporsi konsumsi akhir mengindikasikan, peran pembentukan Modal Tetap Bruto dan net ekspor masih relatif kecil.

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Tabel 4.2. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>					
a. Rumah tangga	30.111,11	30.176,96	31.235,44	34.069,69	37.371,28
b. LNPRT	986,34	1.007,84	1.043,55	1.133,47	1.232,86
c. Pemerintah	3.259,82	2.960,67	3.079,64	2.938,35	3.049,89
Jumlah	34.357,26	34.145,47	35.358,63	38.141,51	41.654,02
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	41.183,68	40.626,77	42.692,71	46.650,03	50.638,15
Proporsi (persen)	83,42	84,05	82,82	81,76	82,26

Keterangan:

4.3 AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME (APC) DAN AVERAGE PROPENSITY TO SAVE (APS)

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula:

$$\mathsf{APS} = \begin{array}{c} \mathsf{S} & \mathsf{C} \\ \hline \\ \mathsf{Y_d} & \mathsf{APC} = \\ \mathsf{Y_d} & \\ \end{array}$$

Di mana C = Tingkat Konsumsi. S = Tingkat Tabungan. dan $Y_d = Pendapatan disposabel$. Perlu diketahui pula bahwa APC + APS = 1

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

Tabel 4.3. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save, Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Disposabel (Y _d) (Miliar Rp)	39.997,96	40.799,51	42.750,63	46.904,63	47.719,63
Total Konsumsi RT (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>	30.111,11	30.176,96	31.235,44	34.069,69	37.371,28
Total Konsumsi LNPRT (ADHB) (Miliar Rp)	986,34	1.007,84	1.043,55	1.133,47	1.232,86
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) <i>(Miliar Rp)</i>	3.259,82	2.960,67	3.079,64	2.938,35	3.049,89
Total Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)	34.357,26	34.145,47	35.358,63	38.141,51	41.654,02
АРС	.0,75.	.0,74.	.0,73.	0,72	0,78
Tabungan <i>(Miliar Rp)</i>	9.886,85	10.694,98	11.515,19	13.124,94	10,348.35
APS	0,25	0,26	0,27	0,28	0,22

Keterangan:*) Angka sementara

Tabel di atas memperlihatkan bahwa secara nominal total konsumsi akhir cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, bila diperhatikan dari rasio nilai APC ternyata konsumsi akhir cenderung mengalami penurunan, dimana rasio konsumsi rumah tangga meningkat dari 0,75 pada tahun 2019 menjadi 0,78 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat masih menggunakan pendapatan lebih besar untuk konsumsi.

Selama periode 2019-2023, secara nominal tabungan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, total tabungan masyarakat yang berupa tabungan, deposito dan giro mencapai 10,35 triliun rupiah atau meningkat sekitar 29,79 persen dari tahun 2019. Secara rasio nilai APS mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 0,25 menjadi sebesar 0,22 pada tahun 2023. Melihat angka tersebut mengindikasikan kesadaran masyarakat akan menabung/saving semakin tinggi dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Indikator APC dan APS diatas, memperlihatkan bahwa konsumsi masih dominan dibandingkan dengan menabung. Maka wajar apabila PDRB Kabupaten Kediri dari sisi pengeluaran masih digerakan oleh konsumsi, utamanya rumahtangga. Oleh karenanya, perlu dijaga daya beli rumah tangga agar terus meningkat.

^{**)} Angka sangat sementara

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula:

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: $I_t = PMTB tahun ke t$

 $Y_t = \text{Output/PDRB tahun ke t}$

 Y_{t-1} = Output/PDRB tahun ke t-1

Dari rumus tersebut. ICOR dapat diartikan sebagai ukuran yang menyatakan besarnya tambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan satu unit pengeluaran.

Tabel 4.4. Incremental Capital Output Ratio Kabupaten Kediri, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010) (miliar Rp.)	29.193,72	28490,95	29361,67	30800,71	32195,50
Perubahan (miliar Rp.)	1407,30	-702,77	870,72	1439,03	1394,79
PMTB (ADHK 2010) (miliar Rp.)	9091,84	8637,93	8773,56	9397,96	9980,94
ICOR	6,46	-12,29	10,08	6,53	7,16

Keterangan: *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Pada periode 2019 menunjukkan bahwa nilai ICOR berada pada kisaran di atas 6. Angka ICOR ini relatif masih cukup tinggi. Hal ini dapat diartikan penanaman modal (investasi) yang dilakukan Kabupaten Kediri

masih kurang efisien. Pada tahun 2019 nilai ICOR tercatat 6,46 artinya untuk menaikkan output sebesar 1 unit maka diperlukan investasi/PMTB sebesar 6,46 unit. Pada tahun 2020 nilai ICOR bernilai negatif yaitu sebesar -12,29, seiring pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen. Negatifnya nilai ICOR dikarenakan output pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan tahun 2019. Penurunan output dapat terjadi karena sebagian barang modal dijual, rusak ataupun tidak diaktifkan. Kalaupun ada barang modal baru, namun sementara belum berproduksi ataupun bila sudah berproduksi output yang dihasilkan relatif kecil. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 akitivitas produksi nyaris menurun bahkan tidak beroperasional. Dengan demikian, penanaman modal baru, belum menghasilkan output optimal atau dengan kata lain investasi yang ditanamkan pada tahun 2020 belum/tidak efisien.

Pada tahun 2021, nilai ICOR kembali positif menjadi 10,08, yang artinya output tahun 2021 sudah lebih besar dibandingkan tahun 2020 seiring semakin kondusifnya kondisi perekonomian Kabupaten Kediri, meskipun masih dalam masa pemulihan pandemi Covid-19. Namun, nilai ICOR ini masih relatif tinggi yang menunjukkan kegiatan investasi yang dilakukan Kabupaten Kediri relatif kurang efisien. Pada tahun 2022, nilai ICOR sebesar 6,53 yang relatif sama dengan nilai ICOR sebelum masa pandemi. Dan meningkat menjadi 7.16 di 2023.



Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

(miliar rupiah)

Kompon en	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	30.111,11	30.176,96	31.235,44	34.069,69	37.371,28
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	986,34	1.007,84	1.043,55	1.133,47	1.232,86
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.259,82	2.960,67	3.079,64	2.938,35	3.049,89
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	13.832,24	13.332,79	13.608,34	15.255,75	16.680,11
5	Perubahan Inventori	302,64	120,49	232,75	261,21	269,19
6	Net Ekspor	-7.308,45	-6.971,97	-6.507,02	-7.008,43	-7.965,17
	Produk Domestik Regional Bruto	41.183,68	40.626,77	42.692,71	46.650,03	50.638,15

^{*}Angka Sementara

Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

(miliar rupiah)

Kompon en	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	20524,06	20312,78	20907,21	21786,40	22672,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	622,32	625,14	639,21	679,71	730,09
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1882,24	1807,23	1810,45	1812,88	1829,40
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9091,84	8637,93	8773,56	9397,96	9980,94
5	Perubahan Inventori	197,91	78,26	148,64	161,03	158,51
6	Net Ekspor	-3124,65	-2970,39	-2917,39	-3037,28	-3176,16
	Produk Domestik Regional Bruto	29193,72	28490,95	29361,67	30800,71	32195,50

^{*}Angka Sementara

^{**}Angka Sangat Sementara

^{**}Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

(persen)

Kompone n	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	73,11	74,28	73,16	73,03	73,80
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,39	2,48	2,44	2,43	2,43
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,92	7,29	7,21	6,30	6,02
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	33,59	32,82	31,88	32,70	32,94
5	Perubahan Inventori	0,73	0,30	0,55	0,56	0,53
6	Net Ekspor	-17,75	-17,16	-15,24	-15,02	-15,73
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

^{*}Angka Sementara

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

(persen) Uraian 2019 2020 2021 2022* 2023** Komponen (2) (4) (5) (1) (3) (6) (7) Pengeluaran Konsumsi Rumah 1 4,33 -1,03 2,93 4,21 4,07 Tangga 2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 4,97 0,45 2,25 6,34 7,41 3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,79 -3,99 0,18 0,13 0,91 4 **Pembentukan Modal Tetap Bruto** 4,94 -4,99 1,57 7,12 6,20 5 Perubahan Inventori 6 **Net Ekspor Produk Domestik Regional Bruto** 5,06 -2,41 3,06 4,90 4,53

^{**}Angka Sangat Sementara

^{*}Angka Sementara

^{**}Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Indeks Harga Implisit PDRB (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

Komponen	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	146,71	148,56	149,40	156,38	164,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	158,49	161,22	163,26	166,76	168,86
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	173,19	163,82	170,10	162,08	166,72
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	152,14	154,35	155,11	162,33	167,12
5	Perubahan Inventori	-	90.	-	-	-
6	Net Ekspor		5	-	-	-
**	Produk Domestik Regional Bruto	141,07	142,60	145,40	151,46	157,28

^{*}Angka Sementara

Tabel 6. Laju Indeks Harga Implisit PDRB (2010=100) Menurut Pengeluaran Kabupaten Kediri Tahun 2019-2023

(persen)

Kompone n	Uraian	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2,75	1,26	0,56	4,67	5,40
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2,40	1,72	1,27	2,14	1,26
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,31	-5,41	3,83	-4,72	2,86
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,62	1,45	0,49	4,66	2,95
5	Perubahan Inventori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Net Ekspor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Produk Domestik Regional Bruto	1,58	1,08	1,97	4,16	3,85

^{*}Angka Sementara

^{**}Angka Sangat Sementara

^{**}Angka Sangat Sementara



DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik. <i>Tabel Input Output Indonesia</i> . berbagai seri. Jakarta.
2 <i>Pendapatan Nasional Indonesia</i> . berbagai seri. Jakarta.
3 <i>Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat</i> . berbagai seri. Jakarta.
4 Profil Ekonomi Rumah tangga 1998. Jakarta 1999.
5. Frenken Jim. How To Measure Tangible Capital Stocks. Netherlands. 1992.
6. Host Poul. Madsen. <i>Macroeconomic Accounts An Overview</i> . Pamphlet Series. No. 29. Washington DC. 1979.
7. Keuning. J. Steven. <i>An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia</i> . Statistical Analysis Capability Program. Project Working Paper. Series No.4. Jakarta 1988.
8 <i>Input-Output Table and Analysis</i> . Studies in Methods. Series F No. 14 Rev 1. New York. 1973.
9 <i>Handbook of National Accounting for Production</i> . Sources and Methods. Series F No. 39. New York. 1986.
10. Verbiest Piet. <i>Investment Matrix</i> . Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik. Jakarta. 1997.
11. Ward. Michael. <i>The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries.</i> Paris. 1976.







MENCERDASKAN BANGSA

——— Enlighten the Nation ———



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN KEDIR<u>I</u>

BPS-STATISTICS KEDIRI REGENCY

Jl. Pamenang No. 42, Sukorejo-Ngasem, Kediri, 64182 Telp. 0354-689673, Fax: 0354-689673 (ext 116) Homepage: https://kedirikab.bps.go.id Email: bps3506@bps.go.id